

## KONSEP PAJAK DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibn Khaldun)

Desi Siti Habibah Arifin<sup>1</sup>, Kumar Chindal

<sup>1</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung (Manajemen Keuangan Syariah, FEBI, UIN Sunan Gunung Djati Bandung)

<sup>1</sup> Chandigarh Business School of Administration (Chandigarh Business School of Administration, India)

andhira1507@gmail.com<sup>1</sup>, kumar@indiachest.org

### ABSTRAK

Berbagai macam pemikiran dan karya Ibnu Khaldun menunjukkan betapa terkenalnya dia dalam sejarah peradaban Islam. membuat salah satu kitab Muqadimmah yang paling luar biasa. Ibnu Khaldun membahas banyak bidang, terutama sosiologi, karena banyaknya bidang yang dia pelajari. Salah satu contohnya adalah pajak. Menurut Ibnu Khaldun, hanya pajak yang dianjurkan oleh syariat, yaitu zakat, shadaqah, jizyah, usyr, dan fai, yang dapat diterapkan oleh pemerintah ke atas masyarakat dan didistribusikan secara merata kepada masyarakat. Karena pembangunan akan mendorong masyarakat untuk bekerja, yang akan mendorong kemajuan negara. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Analisis konten, penalaran deduktif, dan penalaran induktif digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun sangat menekankan keadilan yang diberikan pemerintah kepada rakyat, khususnya dalam hal penerimaan dan pembagian pajak. Dengan demikian, keadilan akan mendorong rakyat untuk bekerja lebih keras, yang akan memastikan kemajuan di wilayah tersebut. Selain itu, ada persamaan antara pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini dan yang diterapkan oleh Ibnu Khaldun. Pada masanya, pajak dikenal sebagai kharaj oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, diikuti oleh usyr, yang sekarang dikenal sebagai pajak bea cukai. Ibnu Khaldun juga berbicara tentang penerapan PPN karena dianggap dapat menurunkan tingkat konsumsi masyarakat karena tingginya harga setelah terkena PPN, dan karena penurunan tingkat permint, produsen kena mengalami kerugian.

**Kata Kunci:** FDR, NPF, ROA, ROE

### ABSTRACT

*Ibn Khaldun's various thoughts and works show how famous he is in the history of Islamic civilization. made one of the most extraordinary Muqadimmah books. Ibn Khaldun discussed many fields, especially sociology, because of the many fields he studied. One example is taxes. According to Ibn Khaldun, only taxes recommended by the Shari'a, namely zakat, shadaqah, jizyah, usyr, and fai, can be imposed by the government on society and distributed evenly to society. Because development will encourage people to work, which will encourage the country's progress. Looking from Ibnu Khaldun's perspective. This research is a literature research. Content analysis, deductive reasoning, and inductive reasoning were used to collect data. The results of this research show that Ibnu Khaldun really emphasized the justice provided by the government to the people, especially in terms of tax revenue and distribution. In this way, justice will encourage people to work harder, which will ensure progress in the region. Apart from that, there are similarities between the taxes applied in Indonesia today and those implemented by Ibnu Khaldun. In his time, taxes were known as*

*kharaj by the United Nations, followed by usyr, which is now known as customs taxes. Ibnu Khaldun also talked about the implementation of VAT because it was thought that it could reduce the level of public consumption due to the high prices after being affected by VAT, and because of the decrease in the level of demand, kana producers experienced losses.*

**Keywords:** FDR, NPF, ROA, ROE

## A. PENDAHULUAN

Ibnu Khaldun berkebangsaan Arab dan dikenal sebagai sejarawan, filsuf dan pemikir Muslim. Dalam memandang masyarakat Ibnu Khaldun mendasarkan pada data dan fakta empiris yang bersumber dari pengamatannya. Namun ia juga menggunakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai dalil dalam pemikiran sosialnya. (Nurrizqi et al., 2022). Salah satu poin penting yang menarik adalah pembahasan pajak yang menyangkut dengan hajat orang banyak. Perekonomian yang makmur di awal suatu pemerintahan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih tinggi dari tarif pajak yang lebih rendah, sementara perekonomian yang mengalami depresi akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih rendah dengan tarif yang lebih tinggi (Ulum n.d, 2022). Hal ini terjadi karena pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan rakyat untuk meningkatkan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan dan memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Mereka akan berhenti bekerja jika fungsi atau manfaat pajak itu hilang karena pembebanan yang lebih besar akan berdampak lebih besar pada produksi mereka.

Pada akhirnya, pasar akan runtuh, kondisi rakyat akan semakin memburuk, dan penerimaan pajak akan turun jika rakyat enggan menghasilkan dan bekerja. Oleh karena itu,

Ibnu Khaldun menekankan bahwa fungsi, manfaat, dan mekanisme pajak harus direalisasikan dengan benar dan tepat.

Selain itu, Ibnu Khaldun mendukung negara yang mengutamakan keadilan, kemajuan, dan kemakmuran, dan menginginkan negara yang menjamin penerapan syariat dan berfungsi sebagai instrumen dan kesejahteraan masyarakat. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa pemerintah harus membuat kebijakan anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, dan menghargai hak milik masyarakat. (Indonesia, 2014). Ibnu Khaldun secara jelas menekankan pentingnya peranan perusahaan swasta dan negara dalam pembangunan ekonomi, baginya negara juga faktor penting dalam produksi. Melalui pembelajarannya, negara mampu meningkatkan produksi dan melalui pajaknya mampu melemahkan produksi.

Karena pemerintah membangun pasar terbesar untuk barang dan jasa yang merupakan sumber utama bagi semua pembangunan, penurunan dalam belanja negara tidak hanya menyebabkan kegiatan usaha menjadi sepi dan menurunnya keuntungan, tetapi juga mengakibatkan penurunan dalam penerimaan pajak. Semakin besar belanja pemerintah, kemungkinan semakin baik bagi perekonomian. Belanja tinggi

memungkinkan pemerintah untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan dan politik. Tanpa stabilitas peraturan dan politik, produsen tidak mempunyai insentif untuk memproduksi. (Hasibuan et al., 2017).

Pajak, menurut Ibnu Khaldun, memengaruhi insentif bekerja. Baik populasi maupun produksi akan berkurang karena pajak yang tinggi. Pajak yang tinggi meningkatkan struktur biaya yang dibebankan ke konsumen, menghambat produksi dan mengurangi populasi penduduk. sehingga pada akhirnya akan mengurangi pendapatan pajak karena basis pajak yang menurun, baik objek maupun subjek pajak. (Rafi & Yusmalinda, 2022).

Selain itu, ia mencapai kesimpulan bahwa meringankan seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha memungkinkan mereka untuk mengembangkan bisnis mereka dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar setelah pajak adalah komponen utama dari prospek bisnis. Ia menjelaskan di sini dengan mengatakan bahwa rakyat akan lebih termotivasi untuk berusaha jika pajak dan bea cukai diturunkan. Namun, karena pajak yang lebih rendah dan peningkatan penerimaan pajak, bisnis juga akan maju, meningkatkan kepuasan rakyat. (Padangsidimpuan et al., n.d.).

Melihat situasi pada masa Ibnu Khaldun, ketika penerimaan pajak tinggi tetapi tidak mampu menjalankan fungsi pembangunan secara optimal, tampaknya hal ini juga terjadi di Indonesia. Pajak terus menjadi

penyumbang terbesar anggaran negara di Indonesia dari tahun ke tahun, menjadikannya satu-satunya sumber keuangan rutin negara di luar sumber keuangan lainnya.

Pajak dalam APBN diproyeksikan sebesar Rp. 1.424 triliun pada tahun 2018. Ini meningkat 23,6% dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 1,151 triliun, jauh di atas pertumbuhan alami sebesar 8,9%. Untuk penerimaan pajak, realisasi semester pertama 2018 mencapai 581,5 triliun rupiah, atau 41% dari rencana tahunan. Ini adalah peningkatan yang signifikan karena merupakan yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir, naik dari 34,12% pada tahun 2016 menjadi 39,89% pada tahun 2017. (Sukmalia et al., 2021). Hasil penelitian (Umar & Sun, 2016) Pajak berfungsi sebagai alat penting untuk memerangi kemiskinan dan kesenjangan melalui fungsi redistribusi; dengan kata lain, uang yang diterima oleh negara digunakan untuk membiayai kebutuhan sosial dan menyediakan layanan dasar bagi orang-orang miskin. Angka kemiskinan per Maret 2018 turun, menurut badan pusat statistik. Angka kemiskinan 9,8%.

Dengan demikian pajak harus dikenakan secara proporsional sesuai dengan kemampuan pembayar pajak, sedangkan pajak tak langsung seperti PPN (Pajak Penambahan Nilai) untuk barang-barang tertentu yang mengikis daya beli masyarakat hendaknya ditiadakan, karena dengan peniadaan pajak PPN akan menurunkan harga barang secara spontan, sehingga permintaan akan meningkat. Adanya

interaksi antara permintaan dan penawaran akan menciptakan keuntungan pada perusahaan yang selanjutnya akan dipungut pajaknya oleh administrasi perpajakan yang rapi dan jujur, sehingga penerimaan negara pun menjadi meningkat.

Pajak juga berpengaruh terhadap intensif dan produktivitas, seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) seharusnya pajak yang diberikan kepada tanah yang tidak produktif lebih tinggi dibandingkan dengan tanah yang produktif. Karena tanah yang produktif akan menghasilkan regulasi perekonomian yang mana hasilnya bisa diambil pajak oleh administrasi perpajakan dan membangkitkan gairah rakyat untuk bekerja. Sedangkan tanah yang tidak produktif seharusnya dikenakan pajak yang tinggi karena tidak menghasilkan apa-apa dan membuat perekonomian tidak berkemban. (Agustin Tri Lestari, 2021).

Maka dari itu penulis tertarik untuk membahas pajak menurut Ibnu Khaldun dan pajak yang terjadi di Indonesia dikarenakan adanya kesamaan kondisi dengan tingginya penerimaan pajak tetapi tidak bisa di distribusikan kepada masyarakat secara optimal. Dengan mengambil pemikiran tokoh terkemuka yang ada dalam sejarah Islam, yaitu Ibnu Khaldun yang merupakan tokoh intelektual muslim yang terkemuka di dunia dan pemikirannya telah banyak diterima di kalangan masyarakat Indonesia.

## B. METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang dikenal sebagai sejarah. Jenis penelitian sejarah adalah penelitian biografis, yang menganalisis bagaimana seorang tokoh berhubungan dengan masyarakatnya, termasuk sifat, karakter, dan dampak pemikiran, ide, dan karakter mereka selama hidup mereka. (Isnaini et al., 2021).

Penelitian lembaga pustaka, juga dikenal sebagai penelitian telaah pustaka, adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penilaian kritis dan mendalam terhadap sumber daya pustaka yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang ide-ide baru sebagai dasar untuk mengurangi pengetahuan yang sudah ada. (Financing et al., 2018).

Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa, hal-hal, atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau menyeluruh elemen yang akan mendukung penelitian. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu mencari, mengumpulkan data dan buku yang menjadi sumber data primer dan sekunder adapun data – data yang dikumpulkan dapat berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya.

Teknik Pengolahan data a Meneliti pemikiran disertai inti-inti pokok ajarannya. b Meneliti syarat-syarat Mufassir menurut para

tokoh dan cendekiawan muslim. c Melacak sumber-sumber pemikiran, melihat urgensi konsep distansi sebagai kaca mata analisis sistem pajak yang dapat di diterapkan d Setelah data terkumpul, diolah agar menjadi ringkas dan sistematis. Dimulai dari menulis data data yang berkaitan dengan tema pembahasan, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, dan menyajikan berupa mendekonstruksi dan menyimpulkan.

Teknik Analisis Data Setelah data-data untuk menunjang penelitian dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah tahap analisis data. Menurut Patton analisis data yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. 20 Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode content analisis, yaitu analisis ilmiah tentang konten atau komunikasi.

Metode ini digunakan untuk menganalisis isi dan berusaha menjelaskan hubungan pemikiran tentang masalah yang dibahas, dengan menggunakan berfikir induktif-deduktif dan penarikan kesimpulan. b Penalaran induktif, yaitu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>22</sup> c Penalaran deduktif, yaitu proses berfikir yaitu berangkat dari suatu yang umum kemudian ditarik kedalam suatu yang khusus setelah itu penarikan kesimpulan

Teknik Pengecekan Keabsahan Data. Dalam perspektif filsafat ilmu, keabsahan studi tokoh sebagai salah satu metode penelitian dapat dianalisis dari sudut ontologi, epistemologi dan aksiologi. Secara ontologi studi tokoh bersifat alamiah (dijelaskan apa adanya), induktif (dijelaskan data yang diperoleh dari seorang tokoh, mempertimbangkan etik, emik dan verstehen (peneliti dapat menggali pikiran, perasaan dan motif yang ada di balik tindakan tokoh).

Dari sudut pandang epistemologi studi tokoh dilakukan dengan pendekatan historis, sosio-cultural-religius (tidak melepaskannya dari konteks sosiokultural dan agama sang tokoh) dan bersifat kritis analitis. Adapun dari sudut pandang aksiologis studi tokoh dapat dilihat dari nilai gunanya, terutama dari sudut keteladanan, bahan introspeksi bagi tokoh-tokoh belakangan dan memberi sumbangan bagi perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

pajak bumi (kharaj) dan pajak kepala (jizyah) yang digunakan untuk pembangunan negara<sup>1</sup>. Dalam hal ini Ibnu Khaldun menjelaskan bagaimana pajak boleh diterapkan kepada masyarakat secara umum, akan tetapi dibatasi oleh aturan syariat yaitu zakat, kharaj dan jizyah. Sementara itu ada beberapa pandangan tokoh terkait dengan penerapan pajak yang hidup semasa dengan Ibnu Khaldun yaitu Ibnu Taimiyah dan Asy Syatibi. Pertama menurut Ibnu Taimiyah pajak adalah

pendapatan sekunder dari pendapatan publik, yang diambil dari non Muslim yang tinggal di negaranegara Islam atau dari bea cukai untuk barang impor.

Termasuk pajak yang ada pada masa Ibnu Taimiyah; pajak perorangan / pajak perkapita (jizyah), bea cukai (usyr), pajak tanah (kharaj), pajak atas tambang, pajak perikanan dan industri, dan sebagainya. Yang semua itu dikumpulkan di baitul mal yang sama sebagai sumber pendapatan publik.

Meskipun pajak menjadi pendapatan publik yang menjanjikan tetap saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diselesaikan oleh pemerintah terkait masalah pajak salah satunya adalah masalah keadilan dalam penerapan pajak. Ibnu Taimiyah mengutuk perpajakan yang tidak adil dan sumber pendapatan ilegal pada periode itu. Alasan untuk itu, ia percaya, bahwa kebijakan yang tidak adil dari pihak berwenang dan mereka mengabaikan syari'at islam yang menjadi.

Sementara itu menurut Asy Syatibi Pajak atau dzaribah itu sebenarnya merupakan harta yang difardhukan Allah SWT kepada kaum muslimin dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka, di mana Allah telah menjadikan seorang Imam sebagai pemimpin bagi mereka, yang bisa mengambil harta dan menafkahnnya sesuai dengan objek-objek tertentu dengan mengikuti kebijakannya. Harta yang dikumpulkan ini disebut, dengan pajak atau dzaribah.

Apabila pajak akan dipungut oleh pemerintah dari para penduduknya maka harus meletakkan beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, di antaranya : negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan maslahat umum, tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh Negara, baik dari zakat, jizyah, al-usyr, kecuali dari pajak, harus ada persetujuan dari alim ulama, para cendekiawan dan tokoh masyarakat. Sehingga pemerintah menjadikan pungutan pajak ini sebagai pungutan yang bersifat permanen, melainkan dipungut sesuai dengan kebutuhan Negara.

Dari sini dapat dapat kita pahami bahwasannya konsep pajak yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun masih sangat terpengaruh oleh apa yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah seperti penerapan kharaj, jiyah, usyr dan juga terkait dengan distribusi yang mengharuskan pemerintah selaku pemegang kekuasaan didalam sebuah negara menjalankan fungsinya dengan menjadikan pajak sebagai sumber untuk pembangunan dan mensejahterakan masyarakat secara umum.

Kemudian terkait pemikiran pajak Asy Syatibi yang pernah hidup semasa dengan Ibnu Khaldun, disini antara kedua pemikiran mempunyai ciri khas tersendiri yaitu Ibnu Khaldun menegaskan bahwasannya pajak boleh di pungut oleh pemerintah kepada masyarakat akan tetapi ada batasan yaitu syariat. Sementara itu Asy Syatibi menjelaskan bahwa penarikan pajak hanya boleh dilakukan apabila

negara benar-benar membutuhkan. Akan tetapi secara keseluruhan tujuan anatar Ibnu Khaldun dan Asy Syatibi menekankan aspek kemaslahatan dalam hal pemanfaatan dari penarikan pajak.

Dari beberapa perbandingan pemikiran tokoh tersebut, Ibnu Khaldun mempunyai pandangan pajak yang lebih jauh dan komprehensif terutamanya pajak yang dapat berfungsi untuk meningkatkan semangat masyarakat dalam bekerja sehingga meningkatkan produktifitas negara tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Khaldun bahwa ketika pendapatan dan gaji yang dibebankan atas rakyat itu sedikit, maka mereka semangat dan senang untuk bekerja. Alhasil banyak pembangunan dan semakin bertambah hasil dari semangat itu akibat sedikit beban. Ketika pembangunan telah banyak maka banyak juga jumlah gaji-gaji dan pendapatan-pendapatan itu. akibatnya pajak juga menjadi banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan<sup>4</sup>.

Sehingga alasan Ibnu Khaldun membolehkan penerapan pajak tidak hanya mementingkan dari segi penarikan oleh pemerintah, akan tetapi bagaimana juga menjadikan masyarakat mempunyai rasa memiliki dengan ikut menjadi bagian dari penyumbang pembangunan yang terjadi di negara tersebut dengan cara meningkatkan produktifitas dalam hal perdagangan dengan meringankan pajak seringan mungkin. Adapun yang melatar belakangi pemikiran pajak Ibnu

Khaldun adalah sebagai berikut : 1. Kondisi Politik Kerajaan Setelah daulah terus berkembang dan terus berlanjut, yang mana rajanya berganti satu dengan yang lainnya, mereka mulai berpikir cerdas, hilang pula cara-cara badawah, kesederhanaan, sikap abai dan menghindari harta yang lain.

Sebagaimana menurut Ibnu Khaldun yang mengungkapkan bahwa setelah muncul kerajaan yang amat besar dan tumbuh peradaban yang mendorong kepada kecerdikan. Para pejabat daulah berperilaku pandai. Semakin banyak tradisi dan kebutuhan-kebutuhan mereka karena kenikmatan dan kemewahan dimana mereka tenggelam di dalamnya. Adapun faktor-faktor yang memunculkan pola pemikiran pajak Ibnu Khaldun diatas banyak di pengaruhi oleh dampak dari kemunduran dinasti Abbasiyah. Sifat-sifat yang masih melekat terutama pada pola kehidupan kerajaan yang senang bermewah-mewahan.

Padahal penyebab runtuhnya Dinasti Abbasiyah antara lain sebagai berikut : luasnya wilayah kekuasaan, berdirinya dinasti-dinasti kecil, perebutan kekuasaan di pusat pemerintah, persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, konflik keagamaan, gaya hidup bermewah-mewahan dan bersenang-senang, korupsi (memperkaya diri sendiri). 5 Mental ini lah yang menyebabkan rakyat hilang kepercayaan kepada pemerintah. Sehingga Ibnu Khaldun karena melihat kondisi sosial yang terjadi sangat menekankan

bagaimana pajak yang sudah di dapat dari rakyat harus dikembalikan lagi kepada rakyat dengan cara pembangunan di negara tersebut baik fisik dan non fisik. 2. Kondisi Sosial masyarakat Setiap awal berdirinya sebuah Negara pemasukan akan sedikit tetapi membutuhkan pendapatan yang banyak. Sebagaimana menurut Ibnu Khaldun bahwa apabila daulah itu mengikuti tradisi superioritas dan ashabiyah, maka pasti permulaannya bersifat badawiyah (primitif).

Badawah menuntut sikap saling belas kasihan, pemurah, merendah, menjauhi harta orang lain dan abai untuk mendapatkannya kecuali jarang sekali. Karena itu menjadi sedikit ukuran gaji dan pendapatan dimana harta dihimpun untuk itu. hal itu ialah karena daulah, apabila mengikuti ketentuan agama, maka dia tidak menuntut kecuali tanggungan-tanggungan syariat saja. Yaitu zakat-zakat, pajak bumi (kharaj) dan pajak kepala (jizyah). Dari semua itu sedikit saja yang harus dibagi karena kadar zakat dari harta adalah sedikit sebagaimana anda tahu.

Demikian juga zakat biji-bijian dan binatang ternak, jizyah dan kharaj. Semua tanggungan-tanggungan syari itu adalah sudah ditentukan dan tidak bisa lebih dari ketentuan.<sup>6</sup>

3. Kondisi Intelektual Adapun dalam bidang intelektual, kaum Muslimin pada abad ke empat belas masehi ini sedang mengalami stagnasi pemikiran yang memilukan. Gelombang Hellenisme yang muncul semenjak abad-abad sebelumnya telah mereda, akibat

adanya pukulan Ibn Taimiyah terhadap pemikiran spekulatif dalam teologi dan filsafat. Abad ini merupakan masa yang relatif sunyi bagi dunia Intelektual Islam. Karya-karya yang muncul ketika itu pada umumnya hanya berupa syarh (penafsiran, penjelasan) atau syarh dari syarh.

Oleh karena itu, masa ini ditinjau dari sejarah intelektual Islam dapat disebut sebagai 'asr al-syuruh wa alhawasyi (masa pensarahan dan pemberian catatan pinggir). Tidak banyak karya pemikir Muslim yang lahir pada masa ini sebagai suatu usaha yang orisinal, kecuali beberapa tokoh besar seperti Ibn Khaldun dan Al-Ghazali.<sup>7</sup> Jadi dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwasannya pemikiran Ibnu Khaldun terkait dengan pajak sangat terpengaruh oleh kondisi yang terjadi pada saat itu, terutamanya setelah kondisi setelah keruntuhan Bani Abbasiyah yang mengalami kemunduran yang disebabkan oleh sikap suka bermewah-mewahan, perilaku korupsi dan ketidak mampuan dalam memimpin.

Selain itu Ibnu Khaldun juga memiliki pemikiran pajak yang Khas di banding dengan tokoh sebelumnya yaitu Ibnu Taimiyah dan Asy Syatibi. Ibnu Khaldun memiliki konsep dimana pajak harusnya bisa meningkatkan produktifitas dan mampu meningkatkan permintaan pasar dengan cara meringankan beban pajak yang di berikan pada rakyat. Hal ini lah yang di yakini Ibnu Khaldun dapat meningkatkan pembangunan di suatu negara di banding dengan menaikkan tarif pajak. Dengan kata lain

pajak yang sudah dipungut oleh negara dapat menjadi motivasi bagi masyarakat dengan dibuktikan oleh banyaknya pembangunan dan tingkat kesejahteraan merata yang diberikan oleh Negara.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai konsep pajak menurut Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap sistem perpajakan di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Konsep pajak yang ditawarkan Ibnu Khaldun menitik tekankan pada keringanan pajak yang ditetapkan oleh negara kepada masyarakat, sehingga menjadi motivasi masyarakat untuk bekerja. Karena antusiasme masyarakat dalam bekerja dan membayar pajak maka terjadinya tingkat penerimaan yang di dapat pemerintah pemerintah tinggi dan pembangunan dapat terus berlanjut.

Pola pemikiran yang ditunjukkan Ibnu Khaldun tidak lain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang terjadi pada saat itu. terutama dampak dari runtuhnya

Daulah Abbasiyah. Selain itu mental yang ditinggalkan daulah tersebut seperti sikap senang dalam kemewahan, korupsi dan nepotisme yang masih saja melekat dengan kuat. 2. Selanjutnya mengenai relevansi pajak menurut Ibnu Khaldun dan pajak yang ada di Indonesia, ada beberapa kesamaan yang terjadi seperti halnya penerapan kharaj yang pada masa saat ini dikenal dengan istilah PBB, selanjutnya penerapan usyr yang pada saat ini

dikenal dengan pajak bea Cukai. Ibnu Khaldun juga memberikan sumbangsih pemikirannya terhadap penerapan PPn, karena dengan adanya pajak pertambahan nilai (PPn) maka daya beli masyarakat akan berkurang dikarenakan tingginya harga barang.

##### **2. Saran**

Saran yang diberikan penulis kemukakan dalam rangka memberi masukan positif sehubungan dengan analisa penulis terhadap konsep pajak menurut Ibnu Khaldun dan relevansinya terhadap sistem perpajakan di Indonesia bahwa untuk memberikan kebijakan publik yang memberi manfaat masalah kepada seluruh masyarakat dan demi berlangsungnya keberlanjutan berbangsa dan bernegara maka terkait penarikan dan distribusi pajak harus dibuat sebaik mungkin. Karena jika tidak dikelola dengan baik maka pajak yang diterima dari rakyat tidak akan bisa terserap untuk pembangunan secara maksimal.

Hasilnya rakyat sebagai penyumbang pajak akan merasa dicurangi dan malas untuk membayar pajak kepada pemerintah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, H. (2018). Analisis Hubungan antara Pendapatan, Dana Pihak Ketiga, dan Return On Asset dengan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 1(1).
- Aboumarzouk OM, Hughes O, Narahari K Et Al. Emphysematous Pyelonephritis: Time For Management Plan With An Evidence-Based Approach. *Arab J Urol* 2014; 12: 106–115.
- Agustin Tri Lestari. (2021). Pengaruh Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Return on

- Asset (Roa) Pada Bank Syariah Anak Perusahaan Bumh Di Indonesia Periode 2011-2019. *Wadiah*, 5(1), 34–60. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i1.3176>
- Ahlering TE, Boyd SD, Hamilton CL Et Al. Emphysematous Pyelonephritis: A 5-Year experience With 13 Patients. *J Urol* 1985 Dec 1; 134: 1086–1088.
- Arikuno, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Astuti, Dewi. *Kamus Populer Istilah Islam*. Jakarta: PT. Gramedia, 2012.
- Aswathaman K, Gopalakrishnan G, Gnanaraj L Et Al. Emphysematous Pyelonephritis: Outcome Of Conservative Management. *Urology* 2008; 71: 1007–1009.
- Aziz, Arnican dan Hartono. *Ilmu Sosial Dasar* ( Jakarta : Bumi Aksara, 1990),
- Azmi, Sabahuddin. *Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik, Konsep*
- B. Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2004.
- Badan Pengelola Statistik (BPS). "Presentase penduduk miskin November 2018 turun menjadi 9,82 persen, dalam <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-pendudukmiskin-november-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html> (diakses pada 18 Januari 2019, Jam 23.36 WIB).
- Bungin. Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Aup, 2001.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: dari teori ke praktik*. GEMA INSANI. <https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&lpg=PP1&hl=id&pg=PR4#v=onepage&q&f=false>
- Falagas ME, Alexiou VG, Giannopoulou KP Et Al. Risk Factors For Mortality In Patients with Emphysematous Pyelonephritis: A Meta-Analysis. *J Urol* 2007; 178: 880–885.
- Financing, S. M., Banks, I. N., & In, S. (2018). *INDONESIA PERIOD 2012-2018*. 45–51.
- Huang JJ, Tseng CC. Emphysematous Pyelonephritis: Clinicoradiological Classification, Management, Prognosis, And Pathogenesis. *Arch Intern Med* 2000; 160: 797–805.
- Ghosh, A. (2017). Sector-specific analysis of Non-Performing loans in the US Banking system and their Macroeconomic Impact. *Journal of Economics and Business*. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2017.06.002>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi ke-9*. Universitas Diponegoro. [https://slims.umh.ac.id//index.php?p=show\\_detail&id=19545](https://slims.umh.ac.id//index.php?p=show_detail&id=19545)
- Chapra, Umer. *The Future of Economics An Islamic Perspective Landcape Baru Perekonomian Masa Depan*. Jakarta : Penerbit SEBI, 2001.
- . *Masa Depan Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Erfanie, Sairi. *Kebijakan Anggaran Pemerintah*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Fitriani, R. (2019). *PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBNU KHALDUN ISLAMIC ECONOMIC THOUGHT OF IBNU KHALDUN*. 2. Iqbal, I. (2022). *Prepektif Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Dalam Konsep Dan Kontribusi Perpajakan Terhadap Perekonomian Di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi*.
- Gusfami. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi*. Jakarta: PT. Prenada Group, 2014.
- Huda, Nurul dkk. *Keuangan Publik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Huda, Nurul dkk. *Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2015.
- Inayah, Gazi. *Teori Komprensip Tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Islahi, A.A. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Tayib. Surabaya : PT. Bina Ilmu., 1997.
- Jirhanuddin, J. (2017). *KONSEP PENGELOLAAN PAJAK YANG ADIL PERSPEKTIF IBNU KHALDUN*. *JURNAL AL-QARDH*, 1(2). <https://doi.org/10.23971/jaq.v1i2.631>
- Kusbiyantoro, S. (2021). *Dinamika Fungsi Dan Mekanisme Pajak Perspektif Ibnu Khaldun*. 4(1). Maleha, N. Y. (n.d.). *Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo*

- Global Mandiri (STEBIS IGM) Palembang  
Email: Nova@stebisigm.ac.id.
- Kaelan. Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner. Yogyakarta: Paradigma, 2012
- Karim, Adiwarmans Azwan. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Khaldun, Ibnu. Muqadimmah, Terj. Masturi Irfham dkk. Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2017
- Harahap, N. K., Siregar, S., & Hardana, A. (2023). Green economy based on sharia maqashid case study in Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District. *Jurnal Mantik*, 7(2). <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>
- Hall JR, Choa RG, Wells IP. Percutaneous Drainage In Emphysematous Pyelonephritis—An Alternative To Major Surgery. *Clin Radiol* 1988 Nov 1; 39: 622–624.
- Hardana, A., Windari, W., Efendi, S., & Harahap, H. T. (2023, July). Comparing Credit Procyclicality in Conventional and Islamic Rural Bank: Evidence from Indonesia. In *Annual International Conference on Islamic Economics and Business (AICIEB)* (Vol. 3, pp. 188-197). <https://doi.org/10.18326/aicieb.v3i0.517>
- Hardana, Ali, Nurhalimah Nurhalimah, and Sulaiman Efendi. “Analisis Ekonomi Makro Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan).” *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2022): 21–30. <https://doi.org/10.35912/sekp.v2i1.1945>
- Hasibuan, A. N., Hardana, A., & Erlina. (2017). Effect Of Operating Costs on Operating Income (Bopo) And Non-Performing Financing (Npf) On Return On Assets (Roa) In Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk For The Period 2009-2017. 136–143.
- Hardana, A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Industri Kecil Di Kota Padangsidempuan Dan Kabupaten Tapanuli Selatan. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 4(1), 129. <https://doi.org/10.24952/tazkir.v4i1.886>
- Hardana, A., & Damisa, A. (2022). Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner. *Medani: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 16–22.
- Hardana, Ali, Nurhalimah Nurhalimah, and Sulaiman Efendi. “Analisis Ekonomi Makro Dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan).” *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 4 (2022): 21–30. <https://doi.org/10.35912/sekp.v2i1.1945>
- Hardana, A. (2023). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan dan kebijakan hutang sebagai variabel intervening. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 4(4), 263-272. <https://doi.org/10.35912/jakman.v4i4.2300>
- Hardana, A., & Hasibuan, A. N. (2023). The Impact of Probability, Transfer Pricing, and Capital Intensity on Tax Avoidance When Listed Companies in the Property and Real Estate Sub Sectors on the Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Islamic Economics*, 5(01), 67–78. <https://doi.org/10.32332/ijie.v5i01.6991>
- Hardana, A., Nasution, J., & Damisa, A. (2022). Analisis Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Nasabah Menabung pada PT. BSI Cabang Padangsidempuan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(2). en Resiko Bank Syariah&Pg=Pp1&Printsec=Frontcover
- Isnaini, L., Haryono, S., & Muhdir, I. (2021). Pengaruh Roa , Car , Bopo , Fdr , Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Npf) Di Bank Umum Syariah. 5(1), 65–75. <https://doi.org/10.29408/jpek.v5i1.3095>
- Jayanti, M. (2021). Pengaruh Return On Asset (Roa), Financing To Deposits Ratio (Fdr) Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Syariah Di Indonesia. 3(1), 25–33.
- Kapoor R, Muruganandham K, Gulia AK Et Al. Predictive Factors For Mortality And Needfor Nephrectomy In Patients With Emphysematous Pyelonephritis. *BJU Int* 2010; 105:986–989.
- Koh KB, Lam HS, Lee SH. Emphysematous Pyelonephritis: Drainage Or

- Nephrectomy? Br J Urol 1993 May; 71: 609–611.
- Kuchay MS, Laway BA, Bhat MA Et Al. Medical Therapy Alone Can Be Sufficient For Bilateral Emphysematous Pyelonephritis: Report Of A New Case And Review Of Previous Experiences. Int Urol Nephrol 2014; 46: 223–227.
- Lu YC, Chiang BJ, Pong YH Et Al. Predictors Of Failure Of Conservative Treatment Among Patients With Emphysematous Pyelonephritis. BMC Infect Dis 2014; 14: 418.
- Misbahul Ali. (2021). Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf Dan Ibnu Khaldun Terhadap Perekonomian Di Indonesia. Alldarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam, 2(1), 1–21. <https://doi.org/10.35316/idarah.2021.v2i1.1-21>
- Misgar RA, Wani AI, Bashir MI Et Al. Successful Medical Management Of Severe Bilateral Emphysematous Pyelonephritis: Case Studies. Clin. Diabetes 2015; 33: 76–79.
- Nasution, Jafar, Ali Hardana, Arti Damisa, and Arbanur Rasyid. “Pelatihan Manajemen Usaha Dalam Meningkatkan Usaha UMKM Kuliner Business Management Training in Improving Culinary MSME Business” 1, No. 5 (2022): 271–80.
- Nurriqzi, F. A., Rizal, M. N., Syuhada, T., & Wijaya, S. (2022). Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Daging: Dampak Dan Saran Kebijakan. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 4(1S), 435–445. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1981>
- Padangsidimpuan, I., Syariah, P., Padangsidimpuan, I., Padangsidimpuan, I., Syariah, P., & Padangsidimpuan, I. (N.D.). Comparative Analysis Of Risk And Return In Pt. Bank Bri Syariah Before And After Spin Off. 39–49. <https://Jurnal.lain-Padangsidimpuan.Ac.Id/Index.Php/Jsbanking/Article/View/4432/2937>
- Perpajakan dan Peran Baitul Mal. Bandung: Nuansa, 2005.
- Pontin AR, Barnes RD, Joffe J Et Al. Emphysematous Pyelonephritis In Diabetic Patients. Br J Urol 1995 Jan; 75: 71–74.
- Rafi, M., & Yusmalinda, D. (2022). Konsep Pajak Menurut Ibnu Khaldun Dan Relevansinya Terhadap Sistem Perpajakan Di Indonesia. 3
- Rahma Putri, D. A., & Rachmawati, L. (2022). Analisis Tingkat Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia. Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.26740/Jekobi.V5n1.P1-12>
- Rohansyah, M., Rachmawati, & Hasnita, N. (2021). Pengaruh Npf Dan Fdr Terhadap Roa Bank Syariah Di Indonesia 1. 1(1), 123–141. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31332/Robust.V1i1.2666>
- Sari, A. P., Nur, M. A., & Sukardi, B. (2023). Jipsya : Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pt Bank Muamalat Tbk. 5(1), 67–83.
- Siregar, B. G., & Hardana, H. A. (2022). Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Merdeka Kreasi Group.
- Sukmalia, D., Saputri, I. Y., Hak, N., & Oktarina, A. (2021a). Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dan Relevansinya Dalam Menghadapi Resesi Di Indonesia. Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(1), 90. <https://doi.org/10.29300/Ba.V6i1.4298>
- Sukmalia, D., Saputri, I. Y., Hak, N., & Oktarina, A. (2021b). Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dan Relevansinya Dalam Menghadapi Resesi Di Indonesia. Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(1), 90. <https://doi.org/10.29300/Ba.V6i1.4298>
- Somani BK, Nabi G, Thorpe P Et Al. Is Percutaneous Drainage The New Gold Standard In The Management Of Emphysematous Pyelonephritis? Evidence From A Systematic Review. J Urol 2008; 179: 1844–1849.
- Schultz EH, Klorfein EH. Emphysematous Pyelonephritis. J Urol 1962 Jun; 87: 762–766.
- Shokeir AA, El-Azab M, Mohsen T Et Al. Emphysematous Pyelonephritis: A 15-

- Yearexperience With 20 Cases. *Urology* 1997 May 1; 49: 343–346.
- Sodqi M, Marih L, Nassib M Et Al. Bilateral Emphysematous Pyelonephritis Cured Bymedical Therapy Alone. *Med Mal Infect* 2006; 36: 174–176.
- Tahir H, Thomas G, Sheerin N Et Al. Successful Medical Treatment Of Acute Bilateralemphysematous Pyelonephritis. *Am J Kidney Dis* 2000; 36: 1267–1270.
- Ulum, B. (n.d.). *Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam*
- Umar, M., & Sun, G. (2016). Non-performing loans (NPLs), liquidity creation, and moral hazard: Case of Chinese banks. *China Finance and Economic Review*, 4(1). <https://doi.org/10.1186/s40589-016-0034-y>.
- Zagoria RJ, Dyer RB, Harrison LH Et Al. Percutaneous Management Of Localizedemphysematous Pyelonephritis. *J Vasc Interv Radiol* 1991 Feb 1; 2: 156–158.